KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			H.1 H.2						H.4 X Final	
				H.2 N Perilibetulari Re- 0 II.3 Terribatalari					H.5 Tidak Final	
A. IDEN	TITAS PENE	ERIMA PENGHASIL	AN YANG	DIPOTONG						
A.1 NPWP : 68 807 562 1 722 000										
A.2 NIK :										
A.3 Nama : TURUT										
B DDh D	24 SAL 21 V	ANG DIPOTONG								
MASA PAJAK (mm-yyyy)		CODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)		TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1 B.2		B.2	B.3		B.4		B.5	B.6	B.7	
2 21-402-01		9.855.000		9.855.000		0	5	492.750		
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota										
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 80										
	Nama Dokumen Faktur Pajak Tanggal 1 1 dd 0 2 mm 2 0 2 2 уууу									
в.9										
No.	Nomor: Tanggal dd mm yyyyy									
В.10										
в.11	.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :									
0 IDEN	TIT 4 0 DE 14	OTONO DA IAK								
		OTONG PAJAK								
	C.1 NPWP Instansi Pemerintah :			9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0 0						
	C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR									
			Н.							
				1 1 dd 0 2 mm 2 0 2 2 yyyy						
C.5 Nama Penandatangan :				RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR						
C.6 Pe	ernyataan Wa	jib Pajak :		Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.						
				dengan ketentuan yang nik sehingga tidak diperl		enderal Pajak	k mengatur bahwa	dokumen ini tel	ah ditandatangani secara	

J5OJ8ISP